BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 880/Kep.91-BKPSDM/2026

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA
TAHUN 2026

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan salah satu fungsi manajemen Aparatur Sipil Negara perihal pemberhentian, perlu dilakukan penyelesaian proses administrasi pensiun secara tepat waktu sesuai dengan siklus anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b bahwa dalam rangka penyelesaian proses administrasi pensiun tersebut diperlukan dukungan, sinergi dan koordinasi dengan seluruh instansi terkait, sehingga perlu dibentuk Tim Pelaksana Penyelesaian Proses Administrasi Pensiun Aparatur Sipil Negara;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pembentukan tim pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Tahun 2026.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2022 Nomor 6);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 12 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2024 Nomor 12);
8. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 90 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2025 Nomor 92).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Tahun 2026.

KEDUA : Susunan tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas:

a. Pengarah.

Memberikan arahan dan petunjuk mengenai Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Tahun Anggaran 2026 kepada pejabat dan tim.

b. Penanggung Jawab.

1. mengkoordinasikan dan mensinergikan kegiatan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian Aparatur Sipil Negara Tahun 2026;
2. melaksanakan dan melaporkan program kerja sesuai pedoman pelaksanaan;
3. melaksanakan tugas dan tanggung jawab lain yang dipandang perlu.

c. Ketua.

1. bertanggungjawab pada pelaksanaan kerja;
2. melakukan koordinasi dan singkronisasi kegiatan dengan setiap anggota tim;
3. memfasilitasi kebutuhan administrasi pelaksana kegiatan.

d. Sekretaris.

1. menyusun rencana kerja kegiatan;
2. melaksanakan pengelolaan urusan surat menyurat dan urusan umum kegiatan;
3. mengelola urusan administrasi keuangan serta rencana penyusunan laporan keuangan Kegiatan;
4. membuat draf laporan kerja tim.

e. Anggota.

1. Unsur pada Badan Kepegawaian Negara
   a) memverifikasi berkas usulan pensiun ASN golongan IV/c ke atas;
   b) menetapkan peraturan teknis pensiun ASN golongan IV/c ke atas.
2. Unsur pada Kantor Regional III BKN, Bandung
   a) memverifikasi berkas usulan pensiun ASN golongan I/a sampai dengan golongan IV/b;
   b) menetapkan peraturan teknis pensiun ASN golongan I/a sampai dengan golongan IV/b.
3. Unsur pada BKPSDM Kabupaten Purwakarta
   a) melaksanakan koordinasi pelaksanaan administrasi pemberhentian ASN;
   b) melaksanakan pembekalan pra pensiun PNS;
   c) meneliti persyaratan pensiun;
   d) memverifikasi berkas usulan Pensiun;
   e) melakukan entri data berkas administrasi pensiun dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA berpedoman kepada ketentuan peraturan Perundang-undangan.

KELIMA : Dalam Melaksanakan Tugas Sebagaimana dimaksud pada diktum KETIGA, Tim Pelaksana Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian Aparatur Sipil Negara Tahun 2026 diberikan Honorarium, dengan besaran sebagai berikut :

a. Pengarah : Rp. 1.500.000,-
b. Penanggungjawab : Rp. 1.250.000,-
c. Ketua : Rp. 1.000.000,-
d. Sekretaris : Rp. 750.000,-
e. Anggota : Rp. 750.000,-

KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

PARAF PEMRAKARSA		
DEVI NOVIANTI,S.STP,M.Si	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
CIKA SISKAWATI,ST,M.Tr.AP	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir.SRI JAYA MIDAN,MP	Plt.KEPALA BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA,SH,M.Si	KABAG HUKUM SETDA	
Hj. NINA HERLINA, S.Sos	KEPALA BKAD	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN,SP,MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir.SRI JAYA MIDAN,MP	SEKRETARIS DAERAH	

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal : 5 Januari 2026

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PURWAKARTA
NOMOR : 880/Kep. 41- BKPSDM/2026
TENTANG :
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2026

SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KOORDINASI PELAKSANAAN ADMINISTRASI PEMBERHENTIAN APARATUR SIPIL NEGARA TAHUN 2026

I.	Pengarah	:	Bupati
II.	Penanggung Jawab	:	Kepala BKPSDM Kabupaten Purwakarta.
III.	Ketua	:	Sekretaris BKPSDM Kabupaten Purwakarta.
IV.	Sekretaris	:	Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan, BKPSDM Kabupaten Purwakarta.
V.	Anggota	:	1. Unsur Pada Badan Kepegawaian Negara 1 Orang. 2. Unsur Pada Kanreg III BKN, Bandung 2 Orang. 3. Unsur Pada BKPSDM Kab. Purwakarta 5 Orang.

PARAF PEMRAKARSA		
DEVI NOVIANTI,S.STP,M.Si	KEPALA BIDANG PEMBINAAN DAN KESEJAHTERAAN	
CIKA SISKAWATI,ST,M.Tr.AP	SEKRETARIS BKPSDM	
Ir.SRI JAYA MIDAN,MP	Plt.KEPALA BKPSDM	

PARAF KOORDINASI		
SUNTAMA,SH,M.Si	KABAG HUKUM SETDA	
Hj. NINA HERLINA, S.Sos	KEPALA BKAD	
MOCHAMAD ARIF BUDIMAN,SP,MM	ASISTEN SEKDA BIDANG ADMINISTRASI UMUM	
Ir.SRI JAYA MIDAN,MP	SEKRETARIS DAERAH	

BUPATI PURWAKARTA,

SAEPUL BAHRI BINZEIN